

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

**TAHUN
2017**



**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gede Bage-Bandung
Tahun 2017**

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018	
2.1. Visi	2
2.2. Misi	2
2.3. Tujuan	3
2.4. Sasaran	3
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.6. Rencana Kerja Tahun 2018	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan	6
3.2. Program Kerja	6
3.3. Kerangka Regulasi	7
3.4. Kerangka Kelembagaan	8
BAB IV PENUTUP	11
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan peranan Pengadilan tinggi Agama Jawa Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung, PTA Jawa Barat telah menetapkan visi ” **TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya membutuhkan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah PTA Jawa barat tertuang dalam renstra 2015-2019 sedangkan untuk jangka pendeknya perlu ada perencanaan tahunan sebagai penjabaran rencana lima tahunan.

Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dengan memaksimumkan pencapaian visi dan misi PTA itu sendiri, Oleh karena itu program dan kegiatan PTA Jawa Barat diarahkan untuk pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam renstra. Dan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan tersebut perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan harapan semua kegiatan PTA Jawa Barat menjadi terarah dan terukur, sehingga diakhir periode semua program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT adalah:

1. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran
3. Sebagai dasar penilain pencapaian kinerja tahunan Instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

.2.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

2.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun mulai dari tahun 2015-2019, Renstra tersebut merupakan uraian untuk penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.1 : SASARAN STRATEGIS PTA JAWA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target 2019
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2 Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	98
		3 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96
		4 Persentase penurunan sisa perkara	50
		5 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	95
		2 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1 Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2 Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

PTA Jawa Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu untuk mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA Jawa Barat adalah seperti tersebut pada tabel berikut :

TABEL 2.2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PTA JAWA BARAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara tahun}} \times 100\%$
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		d. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun berjalan}} \times 100\%$
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index Kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$

2.6. Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 PTA Jawa Barat adalah merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama PTA Jawa Barat dan juga merupakan rencana tahapan tahun 3 dari Rencana Strategis (Renstra) PTA Jawa Barat Tahun 2015-2019, rencana kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PTA JAWA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target 2017
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2 Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	95
		3 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93
		4 Persentase penurunan sisa perkara	50
		5 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	85
		6 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	85
		2 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1 Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2 Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan PTA Jawa Barat dalam dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3.2. Program Kerja

Strategi yang diterapkan PTA Jawa Barat dalam pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya itu didukung oleh program dan kegiatan dari Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, sedangkan untuk pendanaannya melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

3.2.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

Program ini dalam rangka mencapai outcome yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan. sesuai dengan tugas pokok PTA Jawa Barat indikator utama programnya adalah :

- meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi
- Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
- Meningkatkan pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tatalaksana secara transparan efektif dan efisien.
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Sedangkan kegiatannya adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Indikator Kinerja, yaitu Penyelenggaran Oprasional Perkantoran dan Non Oprasional serta keluarannya adalah layanan perkantoran.

3.2.3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung

Program ini adalah untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PTA Jawa Barat. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima, yaitu Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

3.2.4. Program peningkatan manajemen peradilan agama

Program ini adalah merupakan suatu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dari Badan Peradilan Agama MA. Program ini untuk mencapai hasil (outcome) yaitu terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama, untuk mencapai itu semua perlu ada dilakukan pengawasan dan pembinaan agar capaiannya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

3.3. Kerangka Regulasi

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PTA Jawa Barat dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis. Kerangka Regulasi yang dibutuhkan untuk itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1 KERANGKA REGULASI PTA JAWA BARAT

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	P. jawab
Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,	Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Dirjen Badilag
	Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi,	Penyempurnaan SOP proses penanganan perkara dengan pemanfaatan teknologi informasi	SK KPTA tentang Penyempurnaan SOP	PTA Jawa Barat
	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan pelayanan publik.	Juklak/juknis pelaksanaan pelayanan publik	Dirjen Badilag
	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Dirjen Badilag
		Standarisasi Pelaksanaan Tusi di lingkungan	Penyusunan Dokumen Akreditasi Lingkungan Peradilan Agama	Dirjen Badilag

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, Tujuan dan sasaran strategis PTA Jawa Barat tersebut dibutuhkan fungsi dan struktur organisasi, yaitu :

3.4.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

untuk melaksanakan itu semua diperlukan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Tinggi
4. Kepaniteraan
5. Kesekretariatan
6. Pejabat Fungsional

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan yang akan dihadapi tahun 2018, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. RKT ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta yang akan dijalankan tahun 2018, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dengan RKT ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program Tahun 2018, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat terwujud dengan baik.

INDIKATOR KINERJA UTMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	P. JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		g. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara tahun}} \times 100\%$	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan = jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan > 3 bulan 	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		i. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	P. JAWAB	SUMBER DATA
		k. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index Kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

Visi : *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung*

- Misi :**
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan		Tgt Jk Mngh	Sasaran		Target					Strategi		
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2015 : 25.917.647.000
		Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96		Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	93	94	95	96	98			2016 : 25.917.647.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	92	93	95	96			2017 : 25.917.647.000
		Persentase penurunan sisa perkara	60		Persentase penurunan sisa perkara	45	50	50	50	50	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	2018 : 25.917.647.000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	75	80	85	90	90			2019 : 25.917.647.000
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	70	70	75	80	85			2015 : 700.500.000
												2016 : 700.500.000	
												2017 : 700.500.000	
												2018 : 700.500.000	
												2019 : 700.500.000	

No	Tujuan		Tgt Jk Mngh	Sasaran	Indikator	Target					Program	Kegiatan	Anggaran
	Uraian	Indikator				Uraian	Indikator	2015	2016	2017			
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	75	80	85	90	95			
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80	85	90	95	95			
3	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2015 :
		Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100			2016 :
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100			2017 :
													2018 :
													2019 :
													647.040.000
													647.040.000
													647.040.000
													647.040.000
													647.040.000

RENCANA KINERJA PTA JAWA BARAT TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Tar get	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tar get	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Penyelenggaraan operasional perkantoran	100	25.312.647.000	
		Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	95			Penyelenggaraan non operasional perkantoran	100	605.000.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93						
		Persentase penurunan sisa perkara	50			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP	100	200.500.000	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	85			jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan MA	100	500.000.000	
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	75						
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	85						
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90						
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan (Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelesaian perkara)	100	647.040.000	
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100						
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100						

